

**STRATEGI PENGEMBANGAN PERIKANAN CAKALANG YANG BERBASIS DI  
PELABUHAN PERIKANAN TIPE D KABUPATEN ACEH BARAT,  
PROVINSI ACEH**

**DEVELOPMENT STRATEGY FOR SKIPJACK TUNA FISHERY BASED ON  
TYPE D FISHING PORT WEST ACEH DISTRICT, ACEH PROVINCE**

**Hafinuddin<sup>1</sup>, Sri Resti<sup>1</sup>, Zuriat<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar, Meulaboh  
Korespondensi: hafinuddin@utu.ac.id

**Abstract**

Skipjack tuna fishery have significant contribution for production of capture fisheries at West Aceh, Aceh province. Based on that, this research aims to formulate development strategy of skipjack tuna fishery based on type D fishing port at West Aceh District. This research is using qualitative approach, where collecting data method is using survey method and purposive sampling was used for collecting data technique. Analysis hierarchy process (AHP) was used to analysis data. The result show that increasing capital for fishermen is main objective to achieve skipjack tuna fishery development. Then, fisheries business actor has strategic role for skipjack tuna fishery development. As for a scenario to develop skipjack tuna fishery is to enhance capacity of fuel station for fishermen and ice plant that is in type D fishing port. Result of this study will be expected to be consideration for fishery stakeholders in developing skipjack tuna fishery at West Aceh District and that is can improving welfare of the skipjack tuna fishermen.

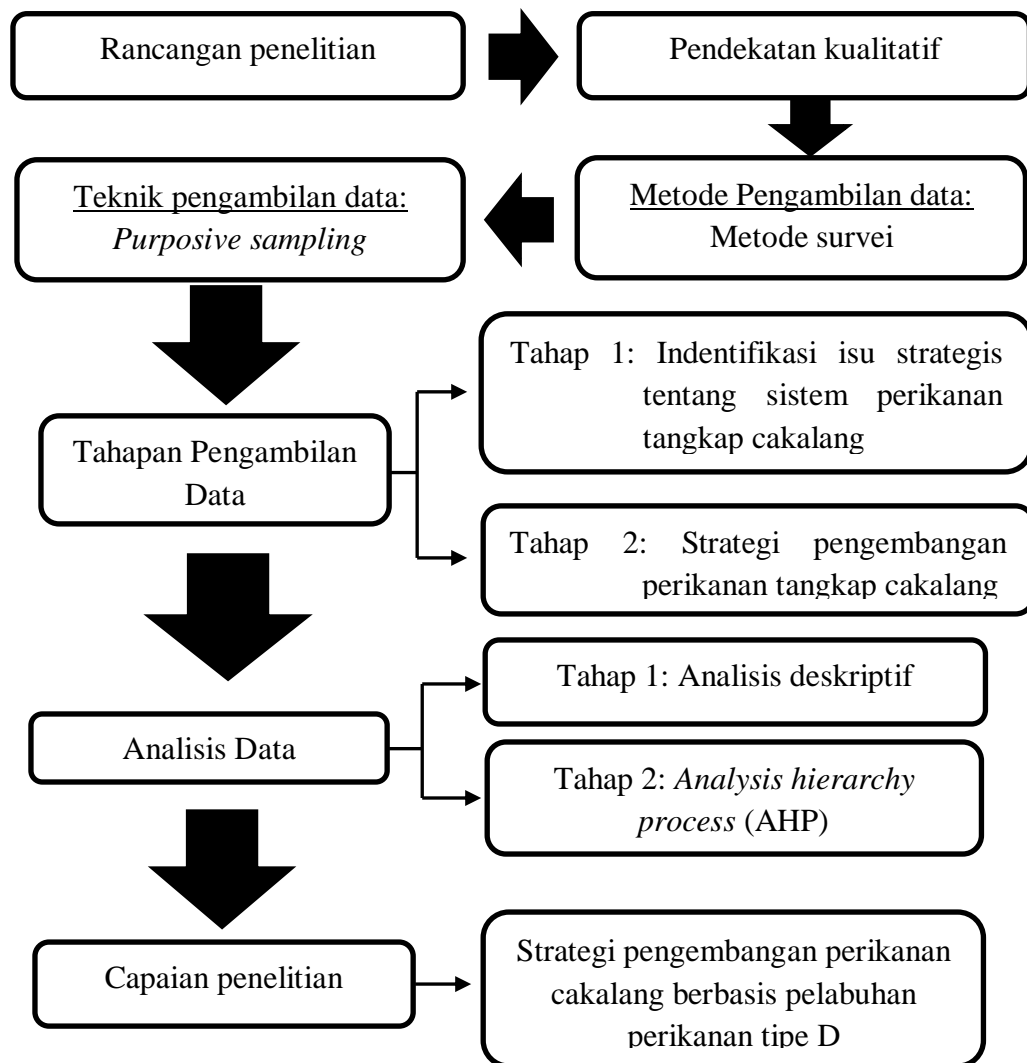
Keywords: *Katsuwonus pelamis*, skipjack tuna, Type D Fishing port, AHP.

**I. Pendahuluan**

Kabupaten Aceh Barat merupakan kabupaten di barat selatan Aceh yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar di antaranya adalah ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*). Produksi ikan cakalang pada tahun 2014 mencapai 1.187,4 ton atau senilai Rp 21.102.479.000,- (DKP Provinsi Aceh, 2015).

Sentral perikanan tangkap komoditas cakalang di Kabupaten Aceh Barat berlokasi di dua pelabuhan perikanan yaitu Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Baroh dan PPI Kuala Bubon. Keberhasilan perikanan cakalang tidak hanya ditentukan dari operasi penangkapan ikan tetapi juga dari pelabuhan perikanan sebagai pusat kegiatan perikanan (*central base of fisheries*) (Lubis, 2007) dan sebagai pusat sistem bisnis perikanan (Menteri Kelautan dan Perikanan, 2012). Pelabuhan perikanan diperlukan untuk menunjang usaha dan pengembangan ekonomi perikanan secara menyeluruh terutama menunjang perkembangan industri perikanan baik hulu maupun hilir, sehingga diharapkan akan tercapai pemanfaatan sumberdaya perikanan yang seimbang, merata dan proposional (Yuspardianto, 2006). Namun kegiatan perikanan cakalang (*skipjack fishery*) di dua lokasi pelabuhan perikanan ini cenderung belum maksimal. Ini terlihat dari sistem perikanan tangkap (pra produksi, produksi dan pasca produksi) di PPI Ujong Baroh dan PPI Kuala Bubon diketahui masih sangat terbatas.





Gambar 2 Desain penelitian sistem perikanan tangkap berbasis komoditas cakalang (*Katsuwonus pelamis*)

Analisis hierarki proses (AHP) telah digunakan dalam analisis strategi pengembangan perikanan cakalang yang berbasis di PPI di Kabupaten Aceh Barat. Adapun langkah-langkah penggunaan AHP dalam studi ini adalah (Saaty, 1993): 1) Menyusun hierarki, 2) menetapkan prioritas dan 3) konsistensi logis, dimana nilai rasio konsistensi harus 10 % atau kurang. Analisis AHP menggunakan perangkat lunak (*software*) *Expert Choice 2000 for Windows*.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kondisi Eksisting Perikanan Tangkap Cakalang Kabupaten Aceh Barat

Isu strategis perikanan cakalang (*Katsuwonus pelamis*) yang berbasis di pelabuhan perikanan tipe D adalah pengembangan perikanan cakalang masih mengalami hambatan, dimana sinkronisasi/koordinasi di antara aktor yang terlibat di dalam pengembangan perikanan cakalang masih sangat terbatas sehingga program-program sebelumnya yang

berasal dari pemerintah cenderung belum memberikan dampak yang signifikan untuk kemajuan perikanan cakalang.

Tabel 1 Isu strategis tentang kondisi perikanan tangkap cakalang Aceh Barat

No	Isu Strategis
1	Pengembangan perikanan tangkap cakalang masih mengalami hambatan mulai dari praproduksi, produksi hingga pasca produksi/pemasaran
2	Masih lemahnya koordinasi antara aktor yang terlibat dalam pengembangan perikanan tangkap cakalang seperti pemerintah daerah, pelaku dunia usaha perikanan cakalang dan kelembagaan perikanan
3	Keberpihakan program pemerintah terhadap pelaku dunia usaha perikanan tangkap cakalang seperti nelayan, pedagang dan pengolah

### 3.2. Perumusan Prioritas Program Pengembangan Perikanan Tangkap Cakalang berbasis di pelabuhan perikanan tipe D di Kabupaten Aceh Barat

#### 3.2.1. Tujuan pengembangan perikanan tangkap cakalang

Tujuan penerapan program pengembangan perikanan tangkap cakalang yang berbasis di pelabuhan perikanan tipe D di Kabupaten Aceh Barat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu 1) peningkatan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan tipe D, 2) peningkatan modal melaut bagi nelayan dan 3) peningkatan sarana dalam aktivitas pemasaran. Hasil perhitungan nilai prioritas elemen tujuan penerapan program secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Nilai prioritas elemen tujuan dari pengembangan perikanan tangkap cakalang

Urutan	Tujuan	Nilai prioritas
1	Peningkatan modal melaut bagi nelayan	0,391
2	Peningkatan sarana dan prasarana di PPI	0,349
3	Peningkatan sarana dalam aktivitas pemasaran	0,260
Rasio Inkonsistensi		0,00665

Berdasarkan Tabel 2, prioritas tertinggi tujuan pengembangan untuk meningkatkan perikanan cakalang adalah peningkatan modal melaut bagi nelayan (0,391). Peningkatan modal melaut menjadi prioritas utama agar nelayan mendapat kemudahan dalam mendapatkan modal melaut sehingga nelayan tidak berhutang dengan tengkulak atau pihak-pihak yang dapat membuat keuntungan usaha perikanan tangkap cakalang menjadi

berkurang. Kusnadi (2000) menjelaskan bahwa salah satu faktor internal (mikro) yang menyebabkan nelayan tetap menjadi miskin adalah keterbatasan modal usaha.

Tujuan pengembangan perikanan tangkap cakalang Aceh Barat selanjutnya adalah peningkatan sarana dan prasarana di PPI (0,349) dan peningkatan sarana dalam aktivitas pemasaran (0,260).

### **3.2.2. Aktor yang berkepentingan dalam pengembangan perikanan tangkap cakalang**

Pelaku dunia usaha memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan perikanan tangkap cakalang ke depannya (Tabel 3). Berdasarkan hasil penilaian prioritas aktor yang berkepentingan dalam pengembangan perikanan tangkap cakalang yang berbasis di pelabuhan perikanan tipe D di Kabupaten Aceh Barat, memperlihatkan adanya elemen aktor yang harus saling bekerja sama sekaligus memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan perikanan tangkap cakalang Aceh barat ke depannya, yaitu pelaku dunia usaha dan pemerintah.

Responden Amran Johan (Panglima Laot PPI Ujong Baroh) menyatakan bahwa pengembangan perikanan tangkap cakalang ke depan akan menjadi lebih baik, jika ketiga aktor tersebut perlu saling koordinasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar pengembangan yang dilakukan ke depan sesuai sasaran yaitu untuk memudahkan nelayan dalam meningkatkan usaha dan kesejahteraannya.

Tabel 3 Nilai prioritas elemen aktor yang berkepentingan dalam pengembangan perikanan tangkap cakalang

<b>Urutan</b>	<b>Aktor</b>	<b>Nilai prioritas</b>
1	Pelaku dunia usaha	0,587
2	Pemerintah	0,219
3	Kelembagaan	0,194
	Rasio Inkonsistensi	0,02

Menurut Hasaruddin dan Solihin (2014) elemen aktor dalam usaha perikanan tangkap memiliki peran strategis dan harus saling berkoordinasi dalam pengembangan perikanan tangkap.

### **3.2.3. Sub aktor yang berkepentingan dalam pengembangan perikanan tangkap cakalang**

Aktor pemerintah terdiri dari sub aktor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat dan UPTD PPI. Tabel dan Gambar menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat merupakan elemen sub aktor dari aktor pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam pengembangan PPI Meulaboh.

Tabel 4 Nilai prioritas elemen sub aktor dari aktor pemerintah yang berkepentingan dalam pengembangan perikanan tangkap cakalang

Urutan	Sub aktor	Nilai prioritas
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat	0,842
2	UPTD PPI	0,158
Rasio Inkonsistensi		0,00

*Toke boat* sebagai sub aktor dari aktor pelaku dunia usaha memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan sub aktor dari aktor pelaku dunia usaha lainnya. *Toke boat* memiliki nilai (0,268), kemudian *toke bangku* dengan nilai (0,264), nelayan (0,215), *muge* dengan nilai (0,133) dan pengolah (0,120). Nilai prioritas elemen sub aktor dari aktor pelaku dunia usaha dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Nilai prioritas elemen sub aktor dari aktor pelaku dunia usaha yang berkepentingan dalam pengembangan perikanan tangkap cakalang

Urutan	Sub aktor	Nilai prioritas
1	<i>Toke boat</i>	0,268
2	<i>Toke bangku</i>	0,264
3	Nelayan	0,215
4	<i>Muge</i> /pedagang ikan keliling	0,133
5	Pengolah	0,120
Rasio Inkonsistensi		0,00851

Prioritas sub aktor dari aktor kelembagaan adalah panglima laot dengan nilai (0,748). Ini terlihat dari posisi dan peranan panglima laot selaku ketua adat dalam membantu nelayan menyelesaikan masalah melaut diantaranya Panglima Laot berperan dalam menjaga ketertiban dalam memperoleh BBM untuk melaut.

Prioritas sub aktor dari aktor kelembagaan berikutnya adalah Panglima Laot (0,748), GAPI (0,149) dan HNSI (0,102). Pentingnya seluruh komponen sub aktor ini untuk bekerja sama dan dalam menjalankan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan pada masing-masing lembaga agar tercapainya peningkatan ekonomi dan sejahteranya pelaku dunia usaha seperti nelayan, *toke bangku*, *muge*, pengolah, dan *toke boat* dibarengi dengan kelestarian sumberdaya perikanan tangkap cakalang. Kelembagaan juga sudah seharusnya melakukan aktivitas kontrol terhadap program pemerintah daerah agar program-program yang direncanakan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan perikanan tangkap cakalang ini agar tepat sasaran.

Tabel 6 Nilai prioritas elemen sub aktor dari aktor kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengembangan perikanan tangkap cakalang

Urutan	Sub aktor	Nilai prioritas
1	GAPI	0,748
2	Panglima Laot	0,149



---

3	HNSI	0,102
	Rasio Inkonsistensi	0,01

---

### 3.2.4. Prioritas program pengembangan perikanan tangkap cakalang Aceh Barat

Pilihan alternatif program/skenario pengembangan perikanan tangkap cakalang mengerucut pada meningkatkan kapasitas SPBU dan pabrik es yang ada di PPI sebagai prioritas utama (0,439). Peningkatan kapasitas SPBU dan pabrik es (0,439) menjadi prioritas utama dalam pengembangan perikanan tangkap cakalang diharapkan dapat memberi kemudahan bagi nelayan cakalang untuk memperoleh bahan pembekalan melaut seperti BBM dan es balok.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat, Amran Johan, bahwa kurangnya kapasitas es yang ada di ruang lingkup PPI membuat nelayan harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli es di luar lingkup PPI. Selain itu, peningkatan kapasitas SPBU juga sangat dibutuhkan para nelayan sehingga nelayan tidak perlu membeli BBM di luar pelabuhan perikanan. Di sisi lain, pembangunan ruang pendingin bagi perikanan cakalang sangat dibutuhkan, terutama unit penangkapan ikan (UPI) cakalang yang sudah cukup banyak sehingga jika armada cakalang pulang sekaligus tiga armada/boat dalam 1 hari maka dengana adanya ruang pendingin kualitas ikan cakalang tetap terjaga dan harga jual tetap menguntungkan nelayan.

Untuk terus memaksimalkan keberadaan perikanan tangkap cakalang sebagai salah satu produksi ikan terbaik, sudah semestinya pengelola UPTD PPI Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat memperhatikan fasilitas pelabuhan perikanan yang diperlukan oleh para pelaku dunia usaha perikanan terutama nelayan cakalang, terutama fasilitas pokok dan fasilitas fungsional. Sebagaimana penilaian prioritas program pengembangan perikanan tangkap cakalang dalam pembangunan sarana dan prasarana di PPI dengan nilai (0,286).

Alternatif pengembangan selanjutnya adalah pengembangan sarana pemasaran komoditas cakalang seperti fiber dan media transportasi. Alternatif ini memiliki nilai prioritas (0,178). Prioritas alternatif pengembangan perikanan tangkap cakalang selanjutnya adalah membentuk koperasi nelayan dengan nilai (0,097). Koperasi nelayan diarahkan untuk memudahkan nelayan untuk melakukan simpan pinjam. Namun menurut Roby Jordan (*toke bangku* ikan cakalang) ke depan koperasi nelayan dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam memudahkan nelayan memperoleh modal melaut tanpa bunga.

## IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hierarki proses bahwa prioritas tertinggi untuk tujuan pengembangan perikanan tangkap cakalang yang berbasis di pelabuhan perikanan tipe D di Kabupaten Aceh Barat adalah peningkatan modal melaut bagi nelayan, dimana aktor pelaku dunia usaha memiliki peran penting dan strategis untuk pengembangan perikanan cakalang ke depan dan sub-aktor yang memiliki peran untuk pengembangan perikanan cakalang adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat (sub aktor pemerintah), *toke*

*boat* dari sub aktor pelaku dunia usaha, dan panglima laot dari sub aktor kelembangaan perikanan. Skenario pengembangan perikanan tangkap cakalang ke depan adalah meningkatkan kapasitas SPBU dan pabrik es yang ada di pelabuhan perikanan tipe D (pangkalan pendaratan ikan/PPI).

### **Daftar Pustaka**

- [DKP]. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. 2015. Statistik Perikanan Tangkap. Sumber: [dkp.acehprov.go.id](http://dkp.acehprov.go.id) diakses 10 April 2017.
- Hasaruddin, H. & Solihin, I. 2014. Strategi peningkatan operasional pelabuhan perikanan tipe D (studi kasus PPI Meulaboh): satu darsawarsa bencana tsunami Aceh, *I* (1): 134 -148.
- Lubis, E. 2007. *Buku I: Pengantar Pelabuhan Perikanan. Bagian Pelabuhan Perikanan*. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung (ID): Humaniora Utama Press.
- Menteri Kelautan dan Perikanan. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR PER. 08 /MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Saaty, TL. (1993). *Proses Hirarki untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks*. Jakarta: Binaman Pressindo.
- Suherman, Agus. 2010. Alternatif pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan Jawa Timur. *Jurnal Saintek Perikanan*, 5 (2): 65-72.
- Yuspardianto. 2006. Studi fasilitas pelabuhan perikanan dalam rangka pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Sumatera Barat. *Jurnal Mangrove dan Pesisir*, 6 (1): 47-57.